

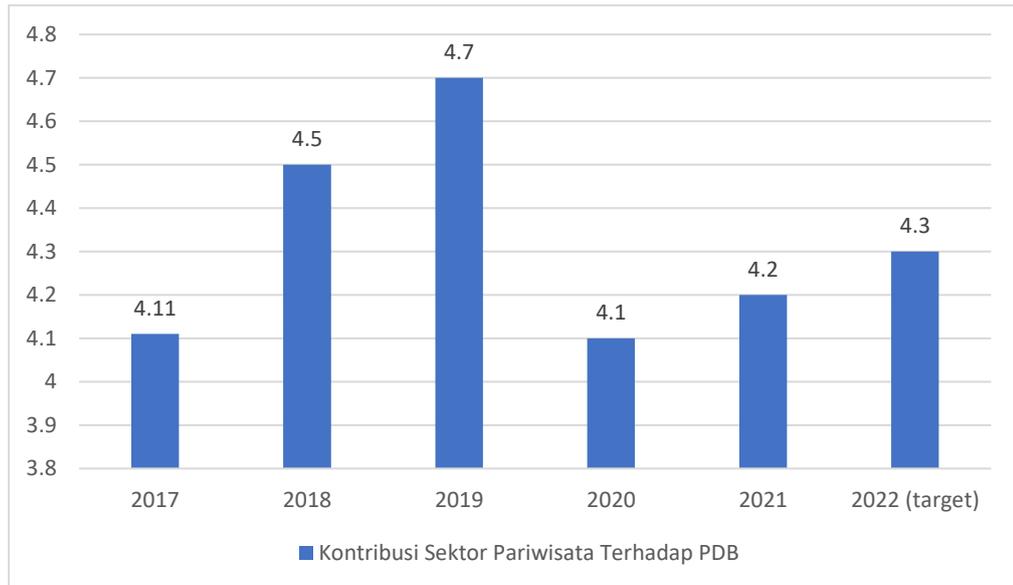
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan baik kekayaan alam maupun keanekaragaman budayanya. Adanya kekayaan alam tersebut dilatarbelakangi dengan bentuk negara Indonesia yang merupakan kepulauan yang membuat Indonesia mempunyai daya tarik dari daratan, pegunungan, pulau-pulau, hingga perairan yang menyimpan banyak kekayaan. Begitu pula dengan keanekaragaman budaya, Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, tradisi, dan berbagai keanekaragaman budaya lainnya. Kekayaan alam dan keanekaragaman budaya tersebut membuat pariwisata di Indonesia menjadi salah satu sektor yang sangat potensial.

Pariwisata menjadi sektor yang memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian masyarakat di Indonesia. Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara (Yakup, 2019).



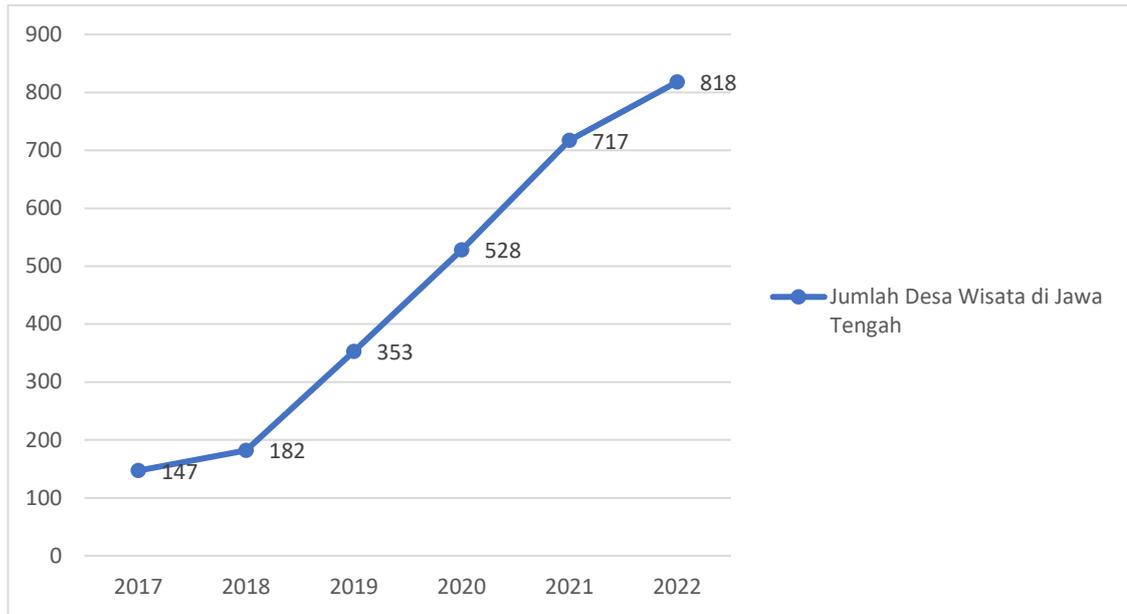
Gambar 1. 1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB Indonesia 2017-2022

Sumber: Kemenparekraf, 2022 (diolah)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi wisata yang beragam. Pembangunan pariwisata memiliki arti yang sangat penting jika ditinjau dari berbagai aspek. Dari sisi ekonomi, seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 sebelum adanya pandemi covid-19 pariwisata sangat berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), baik melalui devisa maupun perputaran ekonomi (DPR, 2019). Meskipun sempat mengalami penurunan akibat adanya covid-19 pada tahun 2020, setelah tahun pertama terdampak covid-19 sektor pariwisata juga telah mulai membaik dalam berkontribusi terhadap perekonomian. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan daerah-daerah di Indonesia mengembangkan wisata yang dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan daerah. Wisatawan yang berjumlah banyak baik berasal dari lokal maupun mancanegara yang berkunjung pada daerah-daerah destinasi pariwisata akan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata baik potensi wisata alam, wisata budaya, maupun wisata kreatif atau buatan yang mendatangkan pengunjung baik lokal maupun mancanegara. Jumlah wisatawan Jawa Tengah pada tahun 2021 yaitu sebanyak 21.334.202 orang wisatawan dengan rincian 1.793 orang wisatawan mancanegara dan 21.332.409 orang wisatawan nusantara (Disporapar Jateng, 2021). Urutan 5 (lima) besar kabupaten/kota yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara adalah Kabupaten Magelang (902), Kabupaten Klaten (463), Kabupaten Semarang (217), Kota Semarang (77), Kota Surakarta (63), sedangkan 5 (lima) besar kabupaten/kota yang banyak dikunjungi wisatawan nusantara adalah Kota Semarang (2.670.281) Kabupaten Klaten (1.627.714), Kabupaten Banyumas (1.498.236) Kabupaten Semarang (1.285.370), Kabupaten Banjarnegara (1.167.841).

Salah satu jenis wisata yang sedang berkembang di Jawa Tengah adalah desa wisata. Desa wisata (Kampung, Nagari, Gampong, atau sebutan lainnya) adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya (Wirdayanti et al., 2021). Perkembangan desa wisata di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1. 2 Perkembangan Jumlah Desa Wisata Jawa Tengah 2019-2022

Sumber: Statistik Pariwisata Jawa Tengah 2021

Pesatnya perkembangan seperti yang terlihat pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi dalam daya tarik wisata desa wisata. Berdasarkan data Disporapar Jateng terbaru pada tahun 2022 jumlah desa wisata di Jawa Tengah adalah 818 desa wisata. Kabupaten/kota dengan jumlah desa wisata terbanyak di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

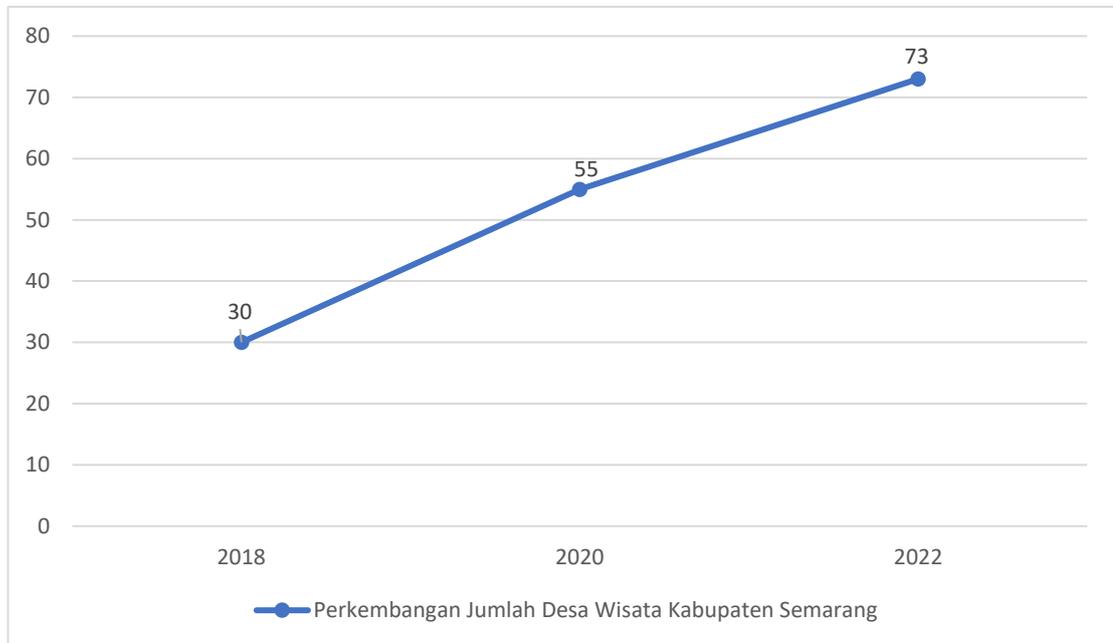
Tabel 1. 1 Kabupaten/Kota dengan Desa Wisata Terbanyak di Jawa Tengah 2022

| No | Kota/Kabupaten | Jumlah Desa Wisata |
|----|---------------------------|--------------------|
| 1 | Kabupaten Semarang | 73 |
| 2 | Kabupaten Magelang | 59 |
| 3 | Kabupaten Wonosobo | 55 |
| 4 | Kabupaten Kudus | 53 |
| 5 | Kabupaten Boyolali | 42 |

Sumber: Disporapar Jateng, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut diketahui bahwa Kabupaten Semarang merupakan kabupaten dengan jumlah desa wisata terbanyak di Provinsi Jawa Tengah dengan 73 desa wisata. Desa wisata yang ada di Kabupaten Semarang

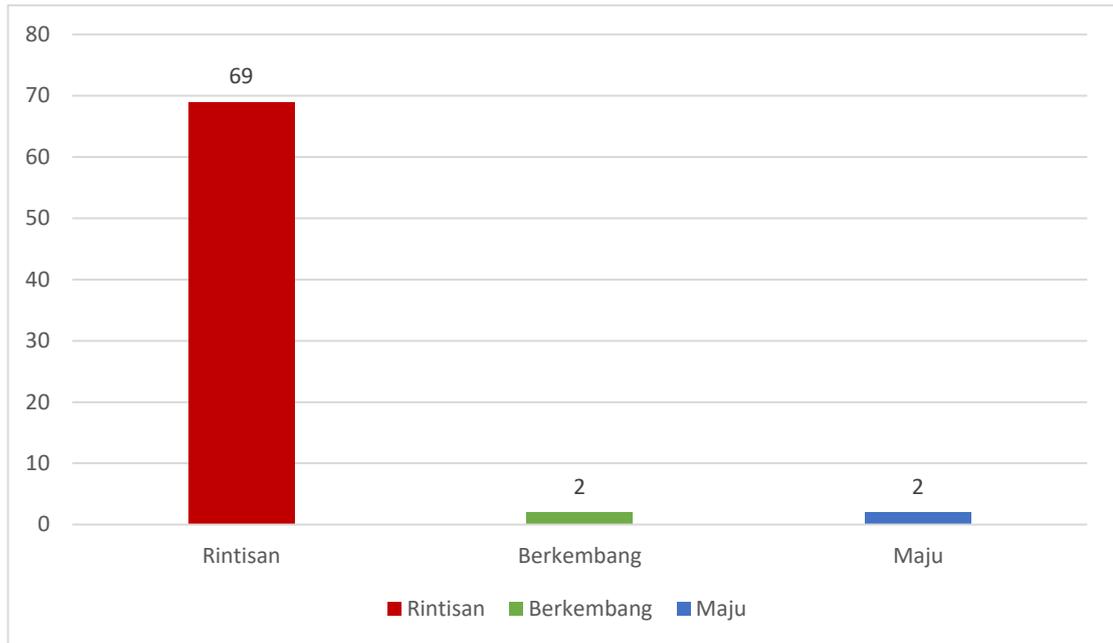
memiliki beragam jenis dari wisata alam, wisata budaya, hingga wisata buatan atau kreatif. Perkembangan jumlah desa wisata di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut:



Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah Desa Wisata Kabupaten Semarang 2018-2022

Sumber: Diolah

Banyaknya jumlah desa wisata di Kabupaten Semarang ini berbanding terbalik dengan kualitas perkembangannya secara kategori desa wisata. Berdasarkan database desa wisata Jawa Tengah per-April 2022 berikut adalah perbandingan jumlah desa wisata di Kabupaten Semarang berdasar kategorinya:



Gambar 1. 4 Perbandingan Kategori Desa Wisata di Kabupaten Semarang

Sumber: Disporapar Jawa Tengah 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.3 diketahui bahwa pesatnya perkembangan kuantitas desa wisata di Kabupaten Semarang belum diikuti perkembangan secara kualitas. Dapat dilihat bahwa 69 dari 73 atau 94,5% desa wisata di Kabupaten Semarang masih berkategori rintisan.

Desa wisata di Kabupaten Semarang salah satunya di wilayah kecamatan Ungaran Barat sebagai kecamatan dengan sebaran desa wisata terbanyak yaitu adalah Kampung Wisata Genuk Indah. Kampung Wisata Genuk Indah merupakan salah satu desa/kampung wisata yang masih berkategori rintisan. Klasifikasi tersebut belum berubah sejak diterbitkannya SK Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Nomor: 556/1094/2020 yang menetapkan hal tersebut. Kampung wisata berkategori rintisan merupakan kampung wisata yang keberadaannya masih berupa potensi yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata, pengembangan sarana prasarana terkait wisata masih terbatas, belum

ada/masih sedikit wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar, kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh, perlu adanya pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta), memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata, dan pengelolaan desa wisata masih bersifat lokal desa (Wirdayanti et al., 2021).

Kampung Wisata Genuk Indah telah dua tahun ditetapkan sebagai kampung wisata namun tidak ada pengembangan signifikan yang dilakukan. Kampung Wisata Genuk Indah yang masih berkategori rintisan tentu berupaya untuk meningkatkan kategorinya dari rintisan menjadi kampung wisata berkembang. Upaya pengembangan ini dilakukan dengan mengacu pada kategori penilaian desa wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) oleh Kemenparekraf sebagai pedoman dalam pengembangan kampung wisata.

Karakteristik kampung wisata rintisan dapat dilihat di Kampung Wisata Genuk Indah untuk dapat ditingkatkan agar menjadi berkembang. Potensi daya tarik Genuk yang ada masih terbatas pada daya tarik wisata buatan berupa kolam renang, yaitu kolam renang Watu Lumpang dan Singampon. Daya tarik Kampung Wisata Genuk Indah yang baru mengandalkan wisata buatan ini membatasi minat pengunjung untuk mendatangi Kampung Wisata Genuk Indah. Daya tarik desa wisata memberikan motivasi awal bagi para wisatawan untuk mengunjungi sebuah destinasi. Daya tarik dapat berupa daya tarik alam, daya tarik budaya, dan daya tarik buatan/kreatif. Kampung Wisata Genuk Indah yang baru mengandalkan kedua kolam renang yang dimilikinya tentu perlu melakukan peningkatan daya tarik wisatanya untuk menarik minat wisatawan.

Adanya souvenir dalam desa wisata juga menjadi salah satu hal penting untuk dapat dijadikan kenang-kenangan oleh wisatawan. Desa wisata harus dapat mengembangkan potensinya ini baik dalam bentuk kuliner, fesyen, atau kriya. Kampung Wisata Genuk Indah dalam hal ini sama sekali belum memiliki souvenir khas kampung wisatanya.

Kampung Wisata Genuk Indah juga belum sama sekali memiliki homestay yang dapat digunakan oleh wisatawan selama di kampung wisata. Homestay atau pondok wisata adalah bentuk penyediaan akomodasi berupa rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan sebagian ruangnya disewakan kepada wisatawan. Konsep ini memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dengan pemilik rumah dalam kehidupan sehari-hari. Adanya homestay dapat memberikan pengalaman yang berkualitas bagi wisatawan dan berpeluang meningkatkan lama tinggal wisatawan di kampung wisata.

Pengembangan konten digital dan kreatif menjadi permasalahan terakhir Kampung Wisata Genuk Indah untuk lebih menarik pengunjung. Kampung wisata harus mampu mengemas potensinya dalam konten kreatif yang menarik. Pembuatan konten kreatif yang menarik menjadi faktor penting untuk mempromosikan kampung wisata. Sedangkan pengembangan digital adalah upaya digitalisasi sebagai sarana penunjang kampung wisata seperti eksistensi desa di platform digital, pusat informasi digital, pengelolaan secara digital, dan lainnya. Kampung Wisata Genuk Indah diketahui belum mengembangkan konten digital dan kreatifnya. Pengembangan baru terbatas pada adanya media sosial milik objek wisata kolam renang Singampon dan Watu Lumpang yang keberadaannya pada platform digital juga sudah lama tidak aktif.

Pengembangan daya tarik wisata, souvenir, homestay, dan konten digital & kreatif perlu untuk dilakukan Kampung Wisata Genuk Indah. Namun, upaya pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah tersebut terhambat karena adanya keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada satu waktu. Pemprov Jateng pada awal 2022 telah menganggarkan 18,5 miliar rupiah untuk membantu 131 desa wisata di Jawa Tengah (Pemprov Jateng, 2022). Kabupaten Semarang diketahui mendapat bantuan dana desa wisata tersebut pada 12 desa wisatanya namun Kampung Wisata Genuk Indah tidak menjadi salah satu penerima bantuan tersebut. Saat ini terkait anggaran pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah masih terbatas pada pengelola daya tarik wisata dan dana desa.

Adanya keterbatasan anggaran yang menyebabkan pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah tidak dapat dilakukan menyeluruh pada satu waktu tersebut menuntut pengembangan harus dilakukan secara bertahap. Pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah yang dilakukan secara bertahap memerlukan prioritas dalam pengembangannya untuk menarik wisatawan. Rekomendasi prioritas pengembangan diperlukan agar Kampung Wisata Genuk Indah memiliki fokus pada pengembangan kampung wisatanya serta untuk menyalasi adanya keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian “*Analytical Hierarchy Process* Pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah Menuju Nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)” ini sebagai rekomendasi bagi Kampung Wisata Genuk Indah dalam mengembangkan potensi kampung wisatanya agar dapat menjadi nominasi ADWI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prioritas pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah yang efektif menuju nominasi ADWI?
2. Apa faktor pendorong prioritas utama dalam pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasikan prioritas pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah yang efektif untuk menuju nominasi ADWI
2. Mendeskripsikan faktor pendorong prioritas utama pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai teori-teori kebijakan publik terutama terkait *Analytical Hierarchy Process* Pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah Kabupaten Semarang Menuju Nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan penulis dalam meneliti tentang *Analytical Hierarchy Process* Pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah Kabupaten Semarang Menuju Nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

b. Bagi Program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan *Analytical Hierarchy Process* Pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah Kabupaten Semarang Menuju Nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

c. Bagi Pengelola Kampung Wisata

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, menjadi bahan pertimbangan, dan rekomendasi dalam pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah Kabupaten Semarang Menuju Nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber acuan dan referensi. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut bersumber dari berbagai artikel jurnal dan skripsi yang terkait dengan penelitian penulis.

Rujukan pertama yaitu penelitian dengan judul “*Sustainable Tourism Development Strategy with AHP (Analytical Hierarchy Process) Method in Pagilaran Tea Plantation Agrotourism, Indonesia*” metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi strategi pengembangan agrowisata Perkebunan Teh Pagilaran yang memiliki keunggulan sebagai model wisata berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa prioritas kriteria faktor dalam strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Agrowisata Pagilaran adalah ekonomi, sosial budaya, ekologi, dan pendidikan. Prioritas tertinggi diberikan pada pendidikan dengan bobot vektor sebesar 0,351. Secara keseluruhan, prioritas alternatif strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Agrowisata Kebun Teh Pagilaran adalah pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas pertama dengan bobot vektor 0,297, diikuti oleh infrastruktur pariwisata sebagai prioritas kedua, pemasaran pariwisata sebagai prioritas ketiga, dan pemberian modal sebagai prioritas keempat (Rosardi et al., 2022).

Rujukan kedua yaitu penelitian berjudul “*Sustainability Strategy in Malang Regency, Indonesia: Analytical Hierarchy Process Approach*” dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk mengidentifikasi strategi yang optimal dalam meningkatkan status keberlanjutan Pujon Kidul, Sanankerto, dan Gubugklakah sebagai desa wisata di Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi terbaik untuk setiap desa wisata adalah mengembangkan wisata petik stroberi melalui pembuatan kemasan produk untuk Pujon Kidul, menciptakan paket wisata baru yang terkait

dengan atraksi air untuk Sanankerto, dan mengembangkan paket wisata gunung berapi Bromo untuk Gubugklakah. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan perkembangan desa wisata dapat tercapai tanpa mengorbankan kelestariannya. (Nurhayati et al., 2022).

Rujukan ketiga yaitu penelitian berjudul “Prioritas Alternatif Pengembangan Ekowisata Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang” menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan tujuan untuk mengetahui prioritas kriteria dan sub kriteria sehingga mengetahui hasil prioritas alternatif. Hasil analisis didapatkan nilai alternatif pengembangan sumber daya manusia sebesar 0,396 merupakan prioritas utama. Prioritas alternatif pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya di bidang pariwisata. Ada empat program yang dapat dilakukan yakni melalui sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat lokal dan pembentukan pemandu wisata (Herniansyah et al., 2019).

Rujukan keempat yaitu penelitian “Perumusan Kriteria Prioritas Penilaian *Livability* Desa Nglanggeran Sebagai Desa Wisata” bertujuan merumuskan kriteria prioritas penilaian *livability* Desa Nglanggeran sebagai desa wisata menggunakan analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa kriteria yang memiliki bobot terbesar adalah utilitas, sedangkan bobot terendah diberikan pada komunitas. Sementara itu, sub-kriteria dengan bobot tertinggi adalah kelayakan lingkungan, dan bobot terendah diberikan pada ketersediaan lahan parkir (Puspita & Umilia, 2021).

Rujukan kelima yaitu penelitian “Strategi Pengembangan Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan pariwisata, faktor pendukung dan penghambat serta strategi pengembangan pariwisata pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan *Analytical Hierarchy Process* dan menemukan bahwa strategi pengembangan pariwisata selama masa pandemi Covid-19 mencakup tiga hal, yaitu branding, promosi melalui media sosial, dan peningkatan daya tarik wisata. Di antara strategi tersebut, promosi melalui media sosial menjadi prioritas. (Widiyanti, 2022).

Rujukan keenam yaitu penelitian berjudul “Prioritas Utama Pengembangan Objek Wisata Buatan di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan Pendekatan AHP (*Analytical Hierarchy Process*)” menggunakan *Analytical Hierarchy Process* dengan tujuan untuk mengidentifikasi alternatif utama objek wisata yang akan dikembangkan di Kecamatan Ngancar oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Hal ini bertujuan agar objek wisata tersebut dapat menjadi penunjang keberadaan Gunung Kelud yang semakin merosot popularitasnya di kalangan masyarakat. Hasil pengukuran menghasilkan kriteria dengan nilai tertinggi adalah atraksi yaitu 52,1% dan untuk alternatif adalah objek wisata Kampoeng Anggrek yaitu 38%. Hal ini sangat relevan apabila wisata Kampoeng Anggrek menjadi urutan pertama yang akan dilakukan pengembangan, karena fokus pemerintah sekarang adalah mengembalikan citra objek wisata Gunung Kelud pasca bencana gunung meletus. Keempat objek wisata baru tersebut yang siap menjadi objek wisata pendukung keberadaan Gunung Kelud ialah Kampoeng Anggrek. Daya tarik Kampoeng Anggrek cukup baik tetapi perlu penambahan atraksi seperti wisata edukasi dapat

dijadikan pertimbangan agar mampu meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut (Prasetyowati & Martini, 2018).

Rujukan ketujuh yaitu penelitian “Strategi Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Gunung Tambora” dengan salah satu tujuannya adalah merumuskan strategi pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat di TNGT. Untuk merumuskan strategi pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat di TNGT menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Dalam perumusan strategi pengembangan wisata alam berbasis masyarakat di Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT) menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP), teridentifikasi tiga aspek prioritas utama yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Strategi prioritas dari aspek ekonomi adalah meningkatkan promosi/pemasaran paket wisata alam dan produk lokal. Dari aspek sosial, strategi prioritas adalah melalui edukasi sejarah, konservasi, dan lingkungan bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Sedangkan dari aspek ekologi, strategi prioritas adalah penataan zonasi TNGT dengan partisipasi masyarakat untuk memperkuat fungsi zonasi. Dengan mengimplementasikan strategi ini, diharapkan pengembangan wisata alam di TNGT dapat dilakukan secara seimbang dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan tersebut (Sulistyantara & Fatimah, 2018).

Rujukan kedelapan yaitu penelitian “Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Wisata Alam Curug Cigamea, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor)” salah satu tujuannya adalah untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan pada Curug Cigamea menggunakan AHP. Berdasarkan penilaian para ahli, aspek kelembagaan menjadi prioritas utama dalam pengembangan

pariwisata. Dengan demikian, penguatan sistem kelembagaan menjadi fokus utama dalam merumuskan strategi pengembangan yang berkelanjutan untuk Curug Cigamea. Temuan ini memberikan dasar yang penting dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Curug Cigamea (Yustika et al., 2020).

Rujukan kesembilan yaitu penelitian berjudul “Strategi Pengelolaan Dampak Wisata di Taman Wisata Alam Lembah Harau Sumatera Barat” merumuskan strategi pengelolaan dampak wisata di TWA Lembah Harau Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) untuk merumuskan strategi pengelolaan dampak wisata. Hasil penelitian ini strategi yang diusulkan untuk mengelola dampak pariwisata di TWA Lembah Harau melibatkan tiga aspek utama, yaitu penguatan kolaborasi pemangku kepentingan, penguatan kelembagaan, dan penguatan regulasi wisata berkelanjutan. Prioritas strategi tersebut ditentukan berdasarkan bobot yang diberikan, dengan penguatan kolaborasi pemangku kepentingan mendapatkan bobot sebesar 0,37, penguatan kelembagaan mendapatkan bobot sebesar 0,36, dan penguatan regulasi wisata berkelanjutan mendapatkan bobot sebesar 0,26 (Junarsa, 2022).

Rujukan kesepuluh yaitu penelitian berjudul “Penentuan Lokasi Wisata Pantai Dan Pulau Terbaik di Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process*” bertujuan untuk menentukan lokasi wisata pantai terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menghasilkan Pantai Padang mendapatkan peringkat tertinggi dengan skor 50,2, diikuti oleh Pantai Air Manis, Pulau Carocok Painan, Pantai Pasir Jambak, Pulau Pemuatan, Pulau Pasumpahan,

dan Pulau Sikuai yang mendapatkan peringkat terendah dengan skor 4,4 (Ardiana et al., 2019).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa untuk menentukan prioritas pengembangan desa/kampung wisata menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Meskipun menggunakan AHP diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu menggunakan kriteria dan alternatif yang berbeda-beda serta belum ada yang menggunakan pemodelan solusi menyesuaikan dengan kategori penilaian dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) sebagai program utama dari Kemenparekraf untuk desa wisata. Genuk Indah yang berupaya melakukan pengembangan agar menjadi kategori berkembang perlu meningkatkan kunjungan wisatawan. Pemilihan kriteria yang sesuai akan mempengaruhi hasil alternatif yang akan terpilih sehingga penting untuk menggunakan kriteria yang tepat untuk menghasilkan alternatif terpilih yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode AHP dengan pemodelan solusi yang mengacu pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

1.5.2 Administrasi Publik

Istilah "administrasi" secara umum dapat didefinisikan sebagai kolaborasi antara beberapa individu untuk mencapai tujuan yang saling berhubungan. Di sisi lain, istilah "publik" berasal dari kata bahasa Inggris "*public*" yang mengacu pada masyarakat, secara umum, atau negara. Publik merujuk kepada sekelompok individu yang berbagi persamaan dalam pemikiran, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma yang mereka anut. (Syafie, 2006).

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014) merupakan suatu proses di mana sumber daya dan personel publik bekerja sama dan disusun secara teratur untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik dianggap sebagai kombinasi antara seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur urusan publik dan menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

Pfiffner dan Presthus (dalam Syafiie, 2006) menyatakan administrasi publik adalah upaya koordinasi individu atau kelompok dalam menjalankan kebijakan pemerintah, atau secara keseluruhan merupakan proses yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengarahannya terhadap keterampilan, dan berbagai teknik yang tak terbatas jumlahnya, yang memberikan arahan dan tujuan terhadap upaya kolektif sejumlah orang.

George J. Gordon mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dijelaskan sebagai rangkaian proses yang melibatkan baik organisasi maupun individu dalam menerapkan atau menjalankan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Ada beberapa makna penting berkenaan dengan hakekat administrasi publik, yaitu:

1. Bidang tersebut berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif;
2. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik;

3. Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah;
4. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi ia overlapping dengan administrasi swasta;
5. Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan *public goods* dan *public services*;
6. Bidang ini memiliki dimensi teoritis dan praktis.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik merupakan proses koordinasi dan manajemen pada sektor publik untuk melakukan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dapat disimpulkan juga bahwa administrasi publik memiliki dua fokus inti, yaitu manajemen publik dan kebijakan publik.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bidang ilmu yang dinamis dan terus mengalami perubahan serta pembaharuan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Munculnya paradigma-paradigma baru mencerminkan sudut pandang para ahli mengenai peran dan tantangan administrasi publik dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Meskipun terdapat perdebatan dalam setiap paradigma, secara umum para ahli mengakui adanya empat perkembangan paradigma dalam administrasi publik. Keempat paradigma tersebut adalah *Old Public Administration* (OPA), *New Public Administration* (NPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Services* (NPS).

1. *Old Public Administration* (OPA)

Paradigma administrasi publik dimulai dengan *Old Public Administration* atau dikenal juga sebagai administrasi publik lama. Paradigma ini juga dikenal sebagai Administrasi Negara Tradisional atau Klasik dan merupakan perkembangan awal dalam ilmu administrasi negara. Tokoh utama dalam paradigma ini termasuk pelopor ilmu administrasi negara, Woodrow Wilson, dengan karyanya "*The Study of Administration*" (1887), serta F.W. Taylor dengan bukunya "*Principles of Scientific Management*".

Teori administrasi publik klasik berkembang pada abad ke-19 dan dikenal sebagai paradigma pertama atau paradigma dikotomi Politik Administrasi dari tahun 1900 hingga 1926. Paradigma ini membahas tentang posisi yang seharusnya diemban oleh administrasi negara, dengan Frank J. Goodnow dan Leonard D. White sebagai tokoh utama yang berpendapat bahwa administrasi negara seharusnya berfokus pada birokrasi pemerintahan. Namun, pandangan ini menimbulkan perselisihan di kalangan akademisi dan praktisi mengenai dikotomi politik-administrasi. Beberapa menganggap bahwa administrasi negara merupakan sub-bidang dalam ilmu politik.

Pada rentang tahun 1927 hingga 1937, muncul paradigma kedua yang mengembangkan prinsip-prinsip administrasi negara dan mencapai puncak kepopulerannya. Pada periode ini, terjadi perkembangan baru dalam administrasi negara dan pengaruhnya meluas ke berbagai bidang, seperti industri dan pemerintahan. Administrasi negara dianggap dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Beberapa tokoh pemikir terkenal pada periode ini antara lain Mary Parker Follet, Henry Fayol, Frederick W. Taylor (Prinsip

Manajemen Ilmiah), dan Max Weber, yang fokus pada pengaruh manajemen terhadap administrasi negara.

Pada tahun 1937, paradigma kedua mencapai puncaknya dengan kontribusi tokoh Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick dalam tulisan mereka yang terkenal, yaitu "*Paper on the Science of Administration*". Tulisan tersebut memperkenalkan konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) yang menjadi sorotan utama. POSDCORB adalah istilah yang mencakup tanggung jawab eksekutif dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan staf, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran.

2. *New Public Administration (NPA)*

Fase ketiga paradigma administrasi publik dikenal sebagai era teori neoklasik, dan salah satu pandangan menarik dalam era ini adalah pandangan Herbert Simon (1947) tentang Konsep Rasionalitas Murni (*Pure Rationality*) dan Rasionalitas Terbatas (*Bounded Rationality*) dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi.

Selain itu, paradigma ketiga merupakan penjelasan tentang administrasi negara sebagai ilmu politik yang mengalami perkembangan antara tahun 1950 hingga 1970. Pada fase ini, upaya dilakukan untuk memperjelas hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Paradigma keempat, yang berlangsung antara tahun 1956 hingga 1970, menganggap administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Prinsip-prinsip manajemen dikembangkan secara ilmiah dan mendalam, termasuk perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern. Pada masa ini, terdapat dua jenis

administrasi negara, yaitu pengembangan ilmu administrasi murni yang didasarkan pada pengaruh psikologi sosial, dan ilmu administrasi yang menjelaskan tentang kebijakan publik. Paradigma kelima, yang muncul sejak tahun 1970, menempatkan administrasi negara sebagai administrasi negara itu sendiri. Pengembangan administrasi negara tidak hanya berfokus pada aspek ilmiah administrasi negara, tetapi juga pada pengembangan teori organisasi. Perhatian khusus diberikan pada teori organisasi, termasuk bagaimana dan mengapa organisasi beroperasi, perilaku individu dalam organisasi, serta bagaimana keputusan diambil dalam organisasi. Selain itu, berkembang pula ilmu kebijaksanaan (*policy science*), politik ekonomi, proses kebijakan pemerintah, analisis kebijakan, dan metode pengukuran kebijakan.

3. *New Public Management* (NPM)

Adanya kritik terhadap teori administrasi klasik dan neoklasik mendorong terjadinya perubahan dalam pelaksanaan administrasi publik, yang kemudian menghasilkan konsep baru yang dikenal sebagai *New Public Management*. Konsep ini awalnya dimaksudkan untuk membawa pandangan baru yang dapat memperkaya konsep ilmu administrasi. Secara khusus, konsep *New Public Management* biasanya diterapkan dalam kegiatan bisnis dan sektor swasta. Inti dari konsep ini adalah mentransformasikan kinerja yang biasanya diterapkan dalam sektor swasta dan bisnis ke dalam sektor publik. Slogan terkenal yang digunakan adalah mengatur dan mengendalikan pemerintahan dengan pendekatan yang tidak jauh berbeda dari mengatur dan mengendalikan bisnis (*run government like business*).

Pada tahun 1992, David Osborne dan Ted Gaebler menulis buku *Reinventing Government*, yang kemudian diikuti oleh buku *Banishing Bureaucracy* pada tahun 1997. Buku *Reinventing Government* merupakan salah satu implementasi dari konsep *New Public Management* (NPM) yang pada intinya bertujuan untuk mengubah jiwa dan kinerja wirausaha (*entrepreneurship*) menjadi bagian dari birokrasi pemerintah.

4. *New Public Services* (NPS)

Secara umum, pandangan *New Public Service* (NPS) menentang paradigma-paradigma sebelumnya seperti *Old Public Administration* (OPA) dan *New Public Management* (NPM). Paradigma NPS didasarkan pada teori demokrasi yang lebih menghargai perbedaan, partisipasi, dan hak asasi warga negara. Dalam NPS, konsep kepentingan publik merupakan hasil dari dialog berbagai nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dianggap sangat penting dalam pelayanan publik.

Paradigma NPS berpendapat bahwa tanggung jawab birokrasi lebih fokus pada warga negara sebagai pemilik pemerintah, bukan sekadar klien, konstituen, atau pelanggan. Pemerintah diharapkan melihat masyarakatnya sebagai warga negara yang membayar pajak. Dalam negara yang menganut prinsip demokrasi, warga negara bukan hanya dianggap sebagai pelanggan yang berhak mendapatkan pelayanan standar, tetapi sebagai pemilik pemerintahan yang memberikan pelayanan tersebut.

Dalam perspektif *New Public Service*, administrator publik diwajibkan untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan pemerintahan dan tugas pelayanan umum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi, serta mencegah potensi terjadinya korupsi dalam birokrasi.

1.5.4 Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (dalam Subarsono, 2005) menyatakan *public policy is whatever governments choose to do or not to do* (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Definisi kebijakan publik oleh Thomas R. Dye mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga tindakan-tindakan di luar pemerintah saat menghadapi masalah publik. Konsep ini memiliki makna yang luas dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo adalah sebuah kebijakan publik.

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Sedangkan menurut Subarsono (2005), kebijakan publik merupakan pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan lain sebagainya.

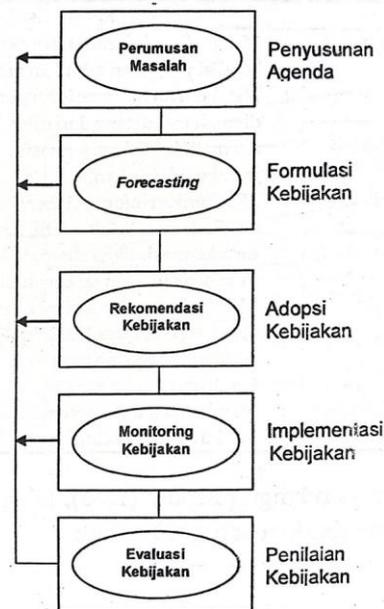
Pendekatan kebijakan publik dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu analisis kebijakan publik dan kebijakan publik politik (Hughes dalam Subarsono,

2005). Pendekatan analisis kebijakan publik lebih berfokus pada studi tentang pembuatan keputusan dan penentuan kebijakan dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang kompleks. Di sisi lain, pendekatan kebijakan publik politik lebih menitikberatkan pada hasil atau *outcome*, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan hubungan antara kebijakan publik dengan administrasi publik adalah kebijakan publik merupakan salah satu bagian dari administrasi publik. Dapat disimpulkan pula bahwa kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu pada suatu kondisi yang melibatkan masyarakat.

1.5.5 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Proses kebijakan publik berkenaan dengan proses membuat pilihan-pilihan kebijakan lengkap dengan tahapan-tahapannya, yang secara teoretis dilandasi oleh berbagai faktor atau pertimbangan, dan nampak dalam model-model kebijakan publik (Hill dalam Keban, 2014). William N. Dunn menyatakan dalam rangka memecahkan masalah yang ada beberapa tahap penting antara lain penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assessment*).



Gambar 1. 5 Proses Kebijakan Publik William N. Dunn

Sumber: (Subarsono, 2005)

Aktivitas politis dalam kebijakan publik terlihat dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Pada tahap penetapan agenda kebijakan, ditetapkan masalah publik yang perlu diselesaikan. Pada tahap formulasi kebijakan, analis mengidentifikasi berbagai kebijakan yang mungkin digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan peramalan (*forecasting*) untuk mengungkapkan konsekuensi dari masing-masing opsi kebijakan yang ada. Tahap adopsi kebijakan adalah langkah berikutnya, di mana pilihan kebijakan ditentukan melalui dukungan dari pihak administratif dan legislatif. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi. Implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang telah

diadopsi dilaksanakan oleh unit administratif tertentu dengan mengalokasikan dana dan sumber daya yang tersedia. Pada tahap ini, dilakukan proses pemantauan (*monitoring*). Tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan, di mana unit-unit yang ditentukan melakukan penilaian apakah proses implementasi sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap ini, evaluasi dilakukan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan publik dari sisi intelektual terdiri dari perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Setiap tahapan memiliki peranan penting untuk mewujudkan kebijakan publik yang efektif sesuai kebutuhan.

1.5.6 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan adalah proses untuk melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Subarsono, 2005). Rekomendasi kebijakan bertujuan untuk menyajikan alternatif kebijakan terbaik dibandingkan dengan alternatif lainnya. Proses pemilihan alternatif dalam memberikan rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada seperangkat kriteria yang jelas dan transparan, sehingga ada alasan yang rasional mengapa suatu alternatif kebijakan dipilih atau ditolak. Proses pemilihan alternatif kebijakan melalui seleksi alternatif harus dilakukan dengan hati-hati agar pemilihan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu.

Seleksi alternatif merupakan salah satu tahap yang sangat vital (Quade dalam Keban, 2014). Untuk melakukan seleksi atau pemilihan alternatif kebijakan dengan efektif, dibutuhkan kriteria atau standar yang rasional. Dengan

menggunakan kriteria tersebut, seorang analis dapat merekomendasikan alternatif yang paling optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

1. Menyepakati kriteria alternatif

Salah satu ahli bernama William N. Dunn (2004) mengemukakan beberapa kriteria penting yang dapat digunakan untuk melakukan seleksi alternatif, yaitu *technical rationality*, *economic rationality*, *legal rationality*, *social rationality*, dan *substantive rationality*.

Technical rationality melibatkan pemilihan antara alternatif berdasarkan kemampuan masing-masing alternatif dalam efektif memecahkan masalah publik yang dihadapi. *Economic rationality* melibatkan pemilihan antara alternatif berdasarkan kemampuan masing-masing alternatif dalam mempromosikan pemecahan masalah publik secara lebih efisien. Dalam konteks ini, dilakukan perhitungan terbaik antara total biaya dan manfaat yang diperoleh bagi masyarakat. *Legal rationality* berhubungan dengan perbandingan antara alternatif berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan hukum yang ada, sejauh mana alternatif tersebut sesuai atau mendukung peraturan perundangan yang berlaku. *Social rationality* berkaitan dengan perbandingan antara alternatif berdasarkan kemampuannya dalam mempertahankan, meningkatkan, dan memperbaiki nilai-nilai dan norma-norma sosial. *Substantive rationality* merupakan bentuk gabungan dari berbagai bentuk rasionalitas (*multiple forms of rationality*) yang mencakup kriteria-kriteria sebelumnya (*technical, economic, legal, dan social*). Kriteria-kriteria ini digunakan untuk secara rasional memilih atau merekomendasikan

alternatif kebijakan melalui teknik kuantitatif sederhana seperti sistem perankingan, sistem indeks, dan sistem pembobotan.

2. Penentuan alternatif terbaik

Tujuan dari penentuan alternatif terbaik adalah untuk memastikan bahwa semua manfaat dan kerugian, kesulitan dan kemudahan, serta dampak positif dan negatif dalam bentuk *output* dan *outcome* dapat diungkapkan secara jelas dan transparan. Pemilihan kriteria dan penilaian skor atau nilai yang digunakan biasanya bergantung pada masalah yang dihadapi. Semakin tinggi kemampuan suatu alternatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi, semakin tinggi nilai yang diberikan (dalam sistem penilaian skor), atau semakin rendah nilai yang diberikan (dalam sistem perankingan).

Hal yang penting dalam tahap ini adalah memilih alternatif terbaik dengan berpikir secara rasional, bersikap demokratis, dan transparan terhadap semua alternatif yang ada. Penilai harus memiliki pengalaman yang memadai dan melibatkan wakil dari semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan mengungkapkan hasil penilaian secara jelas, terbuka, dan tanpa rekayasa. Alternatif tersebut dapat berupa kombinasi dari alternatif-alternatif yang ada jika kombinasi tersebut dianggap paling efektif dalam memecahkan masalah. Hasil dari proses ini adalah terbentuknya rangkaian alternatif terpilih beserta alasan mengapa alternatif tersebut dianggap sebagai yang terbaik. Alternatif-alternatif tersebut siap untuk dijadikan keputusan, program, atau proyek yang kemudian dapat diajukan kepada badan legislatif untuk dipertimbangkan.

3. Pengusulan alternatif terbaik

Suatu usulan alternatif tidak hanya memiliki hubungan sebab-akibat, tetapi yang lebih penting adalah hubungan tersebut memiliki signifikansi yang nyata. Artinya, alternatif tersebut tidak hanya "diperlukan" (*necessary*), tetapi juga "diperlukan dan memadai" (*necessary & sufficient*) untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi kebijakan memiliki hubungan dengan kebijakan publik di mana rekomendasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik. Rekomendasi kebijakan dapat disimpulkan sebagai proses menentukan satu alternatif dari berbagai alternatif dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan.

1.5.7 Pariwisata

Menurut Hunziger dan Krapf dari Swiss (dalam Isdarmanto, 2016) menyatakan pariwisata adalah segala hal yang terkait dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa orang tersebut tidak melakukan suatu pekerjaan penting (*major activity*) yang memberikan keuntungan permanen atau sementara. Dengan demikian, pada dasarnya motif kegiatan pariwisata adalah untuk mengisi waktu luang, bersenang-senang, bersantai, belajar, beribadah, dan mungkin juga untuk kegiatan olahraga. Semua kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat baik secara fisik maupun psikologis bagi pelakunya, baik dalam jangka waktu sementara maupun dalam jangka waktu yang lebih panjang, serta berpotensi untuk keberlanjutan jangka panjang (*sustainable tourism*).

Menurut WTO (dalam Isdarmanto, 2016) Pariwisata mengacu pada kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan di luar lingkungan sehari-hari mereka dan tinggal di sana. Perjalanan wisata ini berlangsung selama kurang dari satu tahun secara berturut-turut, dengan tujuan seperti bersenang-senang, bisnis, dan lain-lain. Pengunjung merujuk kepada siapa pun yang melakukan perjalanan ke daerah lain di luar lingkungan sehari-harinya selama kurang dari 12 bulan berturut-turut, dengan tujuan perjalanan bukanlah untuk mencari nafkah di daerah tersebut. Wisatawan merupakan pengunjung yang menginap atau tinggal di daerah tujuan setidaknya satu malam, baik di akomodasi umum maupun pribadi. Pengunjung harian adalah orang yang melakukan perjalanan wisata tanpa menginap di akomodasi umum atau pribadi di daerah tujuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan untuk mengisi waktu luang dan bersenang-senang dengan melakukan perjalanan ke daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Hubungan pariwisata dengan administrasi publik yaitu pariwisata menjadi salah satu sektor berpotensi yang memerlukan dukungan dari pemerintah dalam melakukan pengembangan. Selain itu pariwisata menjadi salah satu sektor yang berkontribusi bagi kehidupan masyarakat dan sumber pemasukan bagi negara.

1.5.8 Kampung Wisata

Desa wisata (Kampung, Nagari, Gampong, atau sebutan lainnya) adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu

merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya (Wirdayanti et al., 2021).

Desa atau kampung memiliki potensi sebagai destinasi pariwisata yang didasarkan pada partisipasi komunitas dan berakar pada kearifan lokal dan budaya masyarakatnya. Selain itu, pengembangan pariwisata desa juga dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan ekonomi dengan prinsip gotong royong dan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun dari pinggiran atau desa guna mensejahterakan masyarakat Indonesia, dengan menggali potensi lokal dan memberdayakan masyarakat, seperti yang dicanangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan tradisi mereka, serta berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah desa memiliki otonomi dalam mengelola sumber daya dan arah pembangunan desa. Pada pengelolaan desa wisata, nilai kearifan lokal menjadi hal yang sangat penting. Nilai-nilai ini tercermin dalam keunikan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat, integritas nilai-nilai yang tertanam dalam budaya lokal, serta keaslian tradisi yang muncul di masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi Desa Wisata. Salah satu pendekatan pengembangan pariwisata yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah *Community Based Tourism* (CBT), yang juga diterapkan dalam pengembangan desa wisata.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kampung wisata merupakan salah satu jenis pariwisata. Kampung wisata merupakan kawasan yang

memiliki daya tarik khas yaitu daya tarik untuk merasakan pengalaman kehidupan masyarakat yang ada pada pedesaan. Pengelolaan pariwisata dilakukan berbasis masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

1.5.9 Anugerah Desa Wisata Indonesia

Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria-kriteria penilaian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2022a). Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) diselenggarakan untuk menghargai kontribusi masyarakat dalam sektor pariwisata dalam upaya mempercepat pembangunan desa dan mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Tujuan ADWI adalah menciptakan semangat dan harmoni antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta para pelaku pariwisata. ADWI berfokus pada penggalian potensi pariwisata yang menjadi kebanggaan Indonesia melalui penilaian dalam 7 aspek yang telah ditentukan., yaitu Daya Tarik Pengunjung, Homestay, Toilet Umum, Suvenir, Digital dan Kreatif, CHSE, dan Kelembagaan (Kemenparekraf, 2022a).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Anugerah Desa Wisata Indonesia merupakan sebuah ajang pemberian penghargaan untuk desa/kampung wisata dengan 7 kategori penilaian, yaitu daya tarik pengunjung, homestay, toilet umum, suvenir, digital dan kreatif, CHSE, dan kelembagaan. ADWI diadakan untuk mendukung dan mengapresiasi sekaligus menjadi tolok ukur bagi pengembangan desa wisata.

1.5.10 Pengembangan Kampung Wisata

Pengembangan kampung wisata dapat dijabarkan dalam empat kategori, yaitu rintisan, berkembang, maju, dan mandiri (Wirdayanti et al., 2021). Kampung wisata dalam kategori rintisan mengacu pada kampung wisata yang masih berupa potensi yang dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata. Sarana dan prasarana pariwisata di kampung tersebut masih terbatas, dan kunjungan wisatawan, terutama dari masyarakat sekitar, masih sedikit. Kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata juga belum berkembang, sehingga pendampingan dari pihak terkait seperti pemerintah dan swasta sangat diperlukan. Pengembangan kampung wisata ini masih mengandalkan dana desa, dan pengelolaannya masih berfokus pada tingkat lokal desa.

Kampung wisata dalam kategori berkembang merujuk pada kampung wisata yang mulai dikenal dan banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan wisatawan dari luar daerah. Sarana dan prasarana pariwisata serta fasilitasnya telah dikembangkan, dan mulai tercipta lapangan kerja dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.

Kampung wisata dalam kategori maju merujuk pada kampung wisata di mana masyarakatnya telah sepenuhnya menyadari potensi pariwisata dan terlibat dalam pengembangannya. Kampung ini sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Sarana dan prasarana pariwisata telah memadai, dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui kelompok kerja lokal (pokdarwis). Dana desa juga

dimanfaatkan untuk pengembangan desa wisata, dan sistem pengelolaan desa wisata telah memberikan dampak pada peningkatan ekonomi dan pendapatan asli desa.

Kampung wisata dalam kategori mandiri merujuk pada kampung wisata di mana masyarakatnya telah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa. Mereka telah mengembangkan unit kewirausahaan yang mandiri dengan memanfaatkan diversifikasi produk wisata. Kampung ini telah menjadi destinasi wisata yang dikenal secara internasional dan menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia. Sarana dan prasarana pariwisata telah mengikuti standar internasional setidaknya tingkat ASEAN. Pengelolaan desa wisata dilakukan secara kolaboratif antar sektor dengan melibatkan pentahelix dengan baik. Dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa, dan desa telah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri, termasuk dalam pembuatan materi promosi dan penjualan melalui platform digital dan teknologi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengembangan kampung wisata berarti meningkatkan kategori kampung wisata tersebut, dari rintisan menjadi berkembang, dari berkembang menjadi maju, dan dari maju menjadi mandiri. Untuk melakukan peningkatan ini upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pengembangan sesuai dengan kategori penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia, yaitu yaitu daya tarik pengunjung, homestay, toilet umum, souvenir, digital dan kreatif, CHSE, dan kelembagaan.

1.5.11 *Branding* Kampung Wisata

Branding merupakan salah satu strategi pengembangan kampung wisata (Wirdayanti et al., 2021). *Branding* menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan layanan dengan cara yang memperjelas pengambilan keputusan mereka dan dalam prosesnya memberikan nilai bagi objeknya (Keller & Kotler, 2016). Terdapat enam elemen dalam *branding*, yaitu *memorable*, *meaningful*, *likeable*, *transferable*, *adaptable*, dan *protectable*.

Memorable (mudah diingat) yaitu seberapa mudah pengunjung mengingat dan mengenali suatu elemen. *Meaningful* (memiliki makna) yaitu suatu elemen sebaiknya memiliki makna baik deskriptif atau persuasif. *Likeable* (dapat disukai) yaitu seberapa menarik secara estetis suatu elemen secara visual, verbal, atau lainnya. *Transferable* (dapat dialihkan) yaitu dapatkah suatu elemen memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama ataupun berbeda. *Adaptable* (dapat beradaptasi) yaitu seberapa mudah beradaptasi dan diperbarui suatu elemen. *Protectable* (dapat dilindungi) yaitu seberapa dapat dilindungi secara hukum dan persaingan suatu elemen. Kaitan elemen *branding* tersebut dengan pengembangan kampung wisata yaitu elemen branding menjadi kriteria penentuan kategori ADWI mana yang layak mendapat prioritas pengembangan dalam rangka menarik wisatawan.

1.5.12 Analytical Hierarchy Process

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil situasi tersebut (Marsono, 2020). Dasar penggunaan AHP adalah dekomposisi (*decomposition*), perbandingan penilaian (*comparative judgement*), dan sintesa prioritas (*priority synthesis*).

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya melibatkan pemilihan alternatif terbaik. Ini meliputi strukturisasi masalah, identifikasi alternatif, penilaian nilai probabilitas untuk elemen yang tidak pasti, penentuan nilai, preferensi terhadap waktu, dan spesifikasi risiko. Meskipun ada banyak alternatif yang bisa dipertimbangkan dan nilai probabilitas yang bisa dijelajahi, keterbatasan yang tetap ada adalah dasar perbandingan yang disajikan dalam bentuk satu kriteria tunggal. Aspek yang paling penting dalam *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah hierarki fungsional, dengan input utamanya berupa persepsi manusia. Dengan menggunakan hierarki, masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dapat dipecahkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan diatur dalam bentuk hirarki.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa AHP merupakan salah satu sistem pendukung keputusan. AHP menjadi metode yang tepat untuk

menentukan rekomendasi pengembangan kampung wisata dengan kriteria elemen branding.

1.5.13 Analytical Hierarchy Process Pengembangan Kampung Wisata

Analytical Hierarchy Process dalam pengembangan kampung wisata diartikan sebagai penentuan prioritas dari berbagai alternatif dalam pengembangan suatu kampung wisata. Kampung wisata sebagai kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata tentu perlu dilakukan upaya pengembangan untuk mengoptimalkan potensinya. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kategori atau klasifikasi suatu kampung wisata, dari rintisan menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, dan maju menjadi mandiri (Wirdayanti et al., 2021). Pengembangan untuk meningkatkan klasifikasi tersebut dilakukan sesuai dengan kategori penilaian pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang diadakan dalam rangka memberikan apresiasi kepada desa/kampung wisata. Pengembangan kampung wisata bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di mana hal tersebut menjadi tanggung jawab pengelola kampung wisata. Target hubungan antara pengelola kampung wisata selaku pemilik *brand* dengan wisatawan selaku pengguna ditetapkan dalam pembentukan *brand* berupa resonansi *brand* (Ismayanti, 2020). Pemicu munculnya resonansi tersebut adalah elemen *brand*. Upaya menarik pengunjung dan penentuan fokus dalam pengembangan kampung wisata dilakukan berdasar elemen dalam *branding* (Keller & Kotler, 2016).

Pengembangan kampung wisata untuk meningkatkan klasifikasinya yang dilakukan sesuai dengan ADWI memiliki target resonansi *brand* yang dipicu elemen *brand*. *Analytical Hierarchy Process* digunakan sebagai metode penentuan prioritas pengembangan kampung wisata dengan kriteria elemen *brand* dan alternatif kategori penilaian ADWI. Proses ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pengelola kampung wisata dari berbagai alternatif yang ada dalam mengembangkan kampung wisata.

1.6 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan merupakan proses untuk melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. *Analytical Hierarchy Process* yang dikemukakan oleh Thomas L. Saaty (1993) sebagai salah satu metode perbandingan berpasangan dalam rekomendasi kebijakan digunakan pada penelitian ini untuk menentukan prioritas pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah.

1. *Analytical Hierarchy Process* Pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah

Analytical Hierarchy Process merupakan metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam susunan hierarki dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel dengan prioritas tertinggi. *Analytical Hierarchy Process* digunakan dalam menentukan prioritas pada pengembangan kampung wisata

Genuk Indah. Kategori pengembangan kampung wisata dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Genuk Indah yang saat ini rintisan berupaya untuk menjadi berkembang. Kampung wisata berkategori rintisan adalah kampung wisata yang masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata. Sedangkan, kampung wisata berkategori berkembang adalah kampung wisata yang sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah, sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata, dan sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat. Pengembangan dilakukan dengan meningkatkan kategorinya tersebut. Pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah dilakukan berdasarkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dengan menentukan salah satu prioritas pengembangan yang diseleksi skala prioritasnya dengan kriteria elemen *branding*.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam variabel penelitian merujuk pada atribut, sifat, atau nilai yang dimiliki oleh objek atau kegiatan yang memiliki variasi khusus yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian digunakan untuk mengambil kesimpulan. Pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah menuju nominasi ADWI dilakukan dengan menetapkan prioritas alternatif di antara kategori penilaian ADWI yang ditentukan berdasarkan kriteria elemen *branding* guna menentukan prioritas alternatif sebagai rekomendasi kebijakan.

A. Pengembangan Kampung Wisata Berdasarkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)

Pengembangan kampung wisata dari rintisan menjadi berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dilakukan melalui pengembangan pada:

1. Daya Tarik

Atraksi atau yang biasa disebut daya tarik adalah aset-aset yang dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional. Daya Tarik memberikan motivasi awal bagi para wisatawan untuk mengunjungi sebuah destinasi. Daya tarik dibagi menjadi 3 kategori yaitu alam, budaya, dan buatan/kreatif.

2. Suvenir

Suvenir diartikan sebagai kenangan pada suatu tempat yang mempunyai ciri seni budaya yang khas. Suvenir dapat dibedakan menjadi 3 yaitu kuliner, kriya, dan fesyen.

3. Homestay

Homestay merupakan penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk dapat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari bersama pemiliknya.

4. Konten Digital dan Kreatif

Pembuatan konten kreatif yang menarik menjadi faktor penting untuk mempromosikan kampung wisata. Sedangkan pengembangan digital merupakan upaya digitalisasi sebagai sarana penunjang kampung wisata seperti eksistensi desa di platform digital, pusat informasi digital, pengelolaan secara digital, dan lainnya.

B. *Branding* Kampung Wisata

Branding menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan layanan dengan cara yang memperjelas pengambilan keputusan mereka dan dalam prosesnya memberikan nilai bagi objeknya. Pengembangan kampung wisata bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan. Target hubungan antara pengelola kampung wisata selaku pemilik *brand* dengan wisatawan selaku pengguna ditetapkan dalam pembentukan *brand* berupa resonansi *brand* dimana pemicu munculnya resonansi tersebut adalah elemen *brand*. Upaya menarik pengunjung dan penentuan fokus dalam pengembangan kampung wisata dilakukan berdasar elemen dalam *branding* yang akan menjadi kriteria untuk pemilihan di antara alternatif pengembangan kampung wisata, yaitu:

1. *Memorable*

Memorable (mudah diingat) yaitu seberapa mudah pengunjung mengingat dan mengenali suatu elemen.

2. *Meaningful*

Meaningful (memiliki makna) yaitu seberapa bermakna suatu elemen baik secara deskriptif atau persuasif.

3. *Likeable*

Likeable (dapat disukai) yaitu seberapa menarik secara estetis suatu elemen secara visual, verbal, atau lainnya.

4. *Transferable*

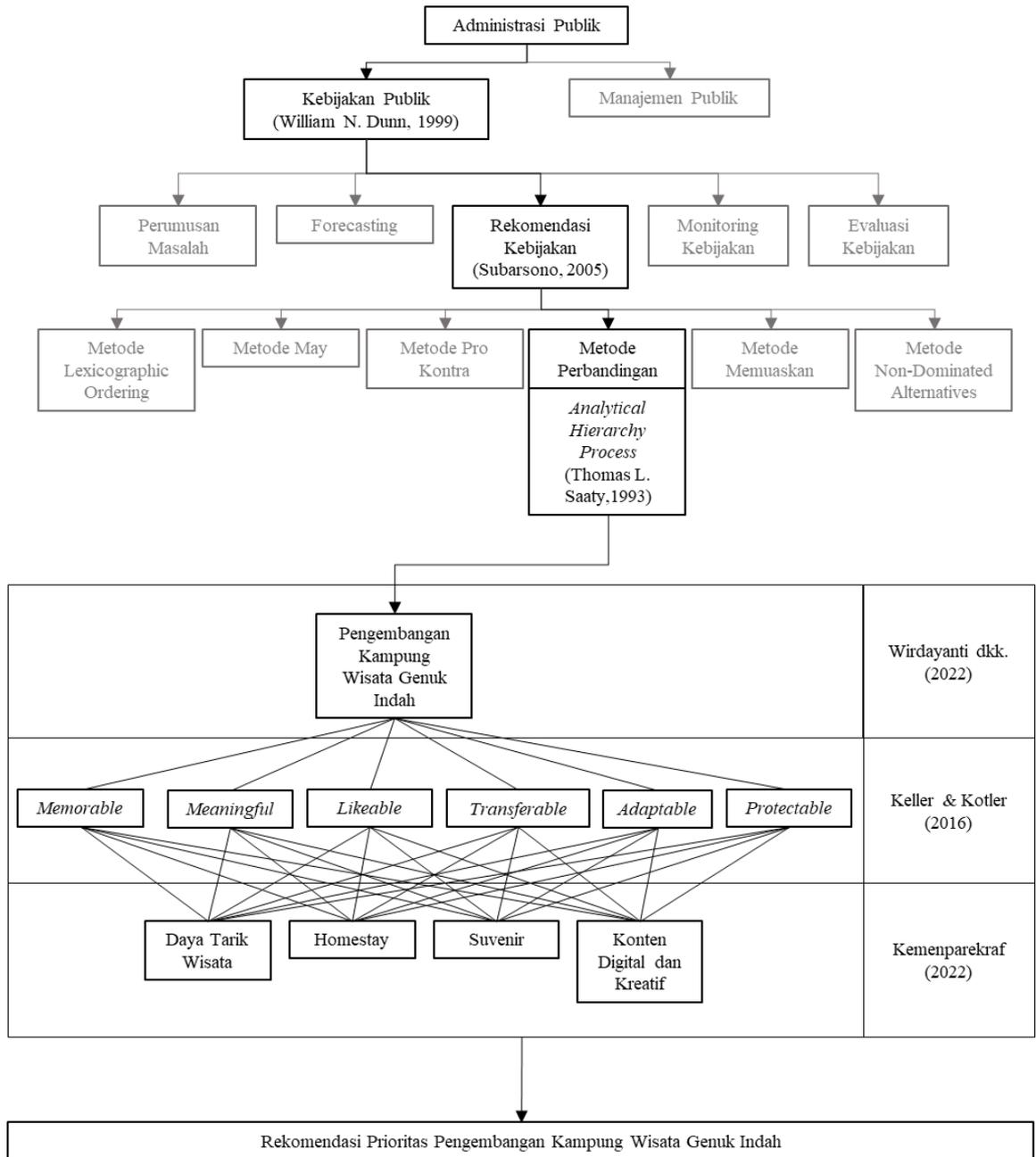
Transferable (dapat dikembangkan) yaitu dapatkah suatu elemen memperkenalkan/mengembangkan produk baru dalam kategori yang sama ataupun berbeda.

5. *Adaptable*

Adaptable (dapat beradaptasi) yaitu seberapa mudah beradaptasi dan diperbaruinya suatu elemen.

6. *Protectable*

Protectable (dapat dilindungi) yaitu seberapa dapat dilindungi secara hukum dan persaingan suatu elemen (dapat bersaing).



Gambar 1. 6 Kerangka Pikir Teoretis

Sumber: William N. Dunn (1999), Subarsono (2005), Thomas L. Saaty (1993), Wirdayanti dkk. (2022), Keller & Kotler (2016), Kemenparekraf (2022)

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah atau kegiatan yang digunakan untuk menjalankan suatu penelitian. Setiap penelitian memiliki rancangan penelitian khusus yang menggambarkan prosedur, langkah-langkah, waktu, sumber data, dan cara untuk mendapatkan serta mengolah data tersebut (Hardani et al., 2020). Tujuan dari rancangan penelitian ini adalah untuk memastikan penggunaan metode penelitian yang sesuai dan merancang kegiatan yang dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sedang diteliti.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif menganalisis data secara sistematis, analisis yang digunakan adalah analisis persentase dan analisis kecenderungan dan kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat umum. Sedangkan, pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam (Hardani et al., 2020).

1.8.2 Populasi dan Sampel

1.8.1.1 Populasi

Populasi merujuk pada seluruh objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa yang menjadi sumber data dengan karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. (Margono dalam Ahyar et al., 2020). Pada metode AHP kualitas responden sangat diutamakan dan tidak bergantung pada kuantitasnya. Penilaian dalam AHP

memerlukan pakar/ahli atau orang yang berkaitan secara langsung pada permasalahan sebagai responden. Selama pihak yang ditentukan sebagai responden memenuhi syarat yaitu ahli atau sangat memahami permasalahan yang ditanyakan, maka ia layak dijadikan responden walaupun jumlahnya satu orang (Marsono, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang berperan secara langsung dalam pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah yang dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Rincian Populasi

| No. | Responden | Jumlah |
|--------|-------------------------------------|--------|
| 1. | Perangkat Kelurahan Genuk | 6 |
| 2. | Pengelola Kolam Renang Watu Lumpang | 5 |
| 3. | Pengelola Kolam Renang Singampon | 5 |
| Jumlah | | 16 |

Sumber: Diolah

1.8.1.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil anggota dari populasi yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel. Sampel tersebut mencerminkan kondisi populasi secara keseluruhan, sehingga kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian berdasarkan sampel harus berlaku juga untuk populasi. Jika populasi memiliki jumlah yang relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang, atau jika penelitian menginginkan tingkat kesalahan yang sangat kecil, maka dapat digunakan sampel jenuh di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel (Hardani et al., 2020). Pada penelitian ini menggunakan seluruh populasi menjadi sampel karena hanya ada 16 orang yang berperan dalam pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah. Rincian sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Rincian Sampel

| No. | Responden | Jumlah |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 1. | Perangkat Kelurahan Genuk | 6 |
| 2. | Pengelola Kolam Renang Watu Lumpang | 5 |
| 3. | Pengelola Kolam Renang Singampon | 5 |

Sumber: Diolah

1.8.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah metode yang digunakan untuk menentukan sampel dengan jumlah yang sesuai untuk menjadi sumber data dalam penelitian, dengan memperhatikan karakteristik dan distribusi populasi untuk mendapatkan sampel yang representatif. Secara umum, teknik pengambilan sampel dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *non probability sampling* dan *probability sampling*.

Penelitian ini merupakan penelitian *non probability sampling* dimana *non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2018). Sampel non probabilita juga tidak digunakan untuk generalisasi (hanya berlaku pada sampel yang diteliti). Penggunaan metode AHP secara spesifik membuat sampel harus seorang yang memahami topik. Selama informan atau responden yang ditentukan sebagai sampel memenuhi syarat yaitu ahli atau sangat memahami permasalahan yang ditanyakan, maka ia layak dijadikan sampel walaupun jumlahnya satu orang (Marsono, 2020). Metode AHP menyaratkan responden dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian maka dapat disimpulkan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Namun, pada penelitian ini karena populasi kurang dari 30 orang maka juga dapat dikatakan menggunakan sampling jenuh di mana seluruh populasi menjadi sampel (Hardani et al., 2020).

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

1.8.4.1 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif yang diperlukan dalam analisis penelitian ini. Jenis data kuantitatif adalah informasi yang diperoleh dalam bentuk angka yang menunjukkan kuantitas, bentuk angka *absolute (parametric)* sehingga dapat ditentukan *magnitudenya* (besarannya) (Hardani et al., 2020). Dengan menggunakan format angka, data kuantitatif dapat diolah menggunakan rumus matematika atau dianalisis menggunakan metode statistik. Pada penelitian ini data kuantitatif akan didapatkan melalui kuesioner/angket dan akan dianalisis menggunakan metode AHP. Selain itu, data kualitatif juga digunakan sebagai data dukung yang bersumber dari hasil kuesioner terbuka. Jenis data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal.

1.8.4.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer ataupun sekunder. Data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung. Sedangkan, data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber- sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber- sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan (Hardani et al., 2020).

1) Data Primer

Data primer merujuk pada jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok, tanpa melalui perantara. Data primer dikumpulkan secara khusus untuk menjawab

pertanyaan penelitian yang diajukan. Penulis mengumpulkan data primer menggunakan kuesioner dan observasi. Metode kuesioner adalah metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan tertulis untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Selanjutnya, penulis juga menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan data. Metode observasi adalah metode pengumpulan data primer yang melibatkan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu.

2) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber data dalam penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara atau telah dicatat oleh pihak lain. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari landasan hukum, catatan, dan laporan historis yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau data dokumenter.

1.8.5 Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah sejumlah klasifikasi yang mencerminkan karakteristik informasi dalam bentuk nilai yang diberikan pada suatu variabel. Skala pengukuran ini mengaitkan nilai-nilai yang diberikan pada variabel tersebut satu sama lain, sehingga tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam bentuk nilai-nilai tersebut.

Salah satu skala pengukuran berdasarkan penggunaannya adalah skala perbandingan Saaty atau skala matriks perbandingan berpasangan. Skala yang digunakan yaitu 1-9. Skala tersebut menurut Saaty (dalam Marsono, 2020) merupakan skala terbaik dalam mengkualifikasikan pendapat. Skala ini digunakan

dalam membandingkan dua elemen atau perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*).

Tabel 1. 4 Skala Perbandingan Berpasangan Saaty

| Intensitas Kepentingan | Definisi | Penjelasan |
|-------------------------------|--|---|
| 1 | Elemen yang satu sama pentingnya dibanding dengan elemen yang lain (<i>equal importance</i>) | Kedua elemen menyumbang sama besar pada sifat tersebut |
| 3 | Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada elemen yang lain (<i>moderate more importance</i>) | Pengalaman menyatakan sedikit memihak pada satu elemen |
| 5 | Elemen yang satu jelas lebih penting dari pada elemen yang lain (<i>essential, strong more importance</i>) | Pengalaman menunjukkan secara kuat memihak pada satu elemen |
| 7 | Elemen yang satu sangat jelas lebih penting dari pada elemen yang lain (<i>demonstrated importance</i>) | Pengalaman menunjukkan secara kuat secara kuat disukai dan didominasi oleh sebuah elemen tampak dalam |
| 9 | Elemen yang satu mutlak lebih penting dari pada elemen yang lain (<i>absolutely more importance</i>) | Pengalaman menunjukkan satu elemen sangat jelas lebih penting |
| 2,4,6,8 | Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan (<i>grey area</i>) | Nilai ini diberikan bila diperlukan kompromi |

Sumber: (Marsono, 2020)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Elemen X | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Elemen Y |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|

Keterangan:

1. Angka 1 jika elemen X memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan elemen Y
2. Bagian kiri, skala diisi jika elemen X memiliki tingkat kepentingan di atas elemen Y
3. Bagian kanan, skala diisi jika elemen Y memiliki tingkat kepentingan di atas elemen X

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Hardani et al., 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyampaian sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan kuesioner campuran, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner tertutup adalah kuesioner penelitian dengan daftar pertanyaan atau pernyataan yang sudah dilengkapi pilihan jawabannya sekaligus di mana pada penelitian ini kuesioner AHP yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang perbandingan dua elemen atau perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) dengan skala yang digunakan yaitu 1-9. Sedangkan kuesioner terbuka adalah kuesioner penelitian yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat pribadinya terhadap daftar pertanyaan atau pernyataan yang tercantum di mana pada penelitian ini dilakukan dengan memberi pernyataan alasan pendukung atas isian dari kuesioner tertutup sebelumnya.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan sistematis dan pencatatan terkait dengan objek yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan teknik observasi untuk memudahkan peneliti mendapatkan mengetahui pengembangan yang telah dilakukan Kampung Wisata Genuk Indah.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka atau kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dengan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, seperti membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang relevan dengan penelitian. Studi pustaka pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan, berita, dan berbagai informasi lain terkait pengembangan Kampung Wisata Genuk Indah.

1.8.7 Teknik Analisis

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah dan memproses data guna menghasilkan informasi yang valid dan mudah dipahami ketika disajikan kepada khalayak umum. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data yang dapat diukur secara skoring atau dinyatakan dalam bentuk angka. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode statistik dan komputerisasi. Hasil analisis kuantitatif ini memiliki sifat yang lebih objektif, rasional, dan bebas dari bias. Hal ini disebabkan karena hasil data diperoleh melalui perhitungan matematika yang sistematis dan terstandar. Analisis kuantitatif pada penelitian ini menggunakan *Analytical Hierarchy Process* sebagai teknik analisis utama.

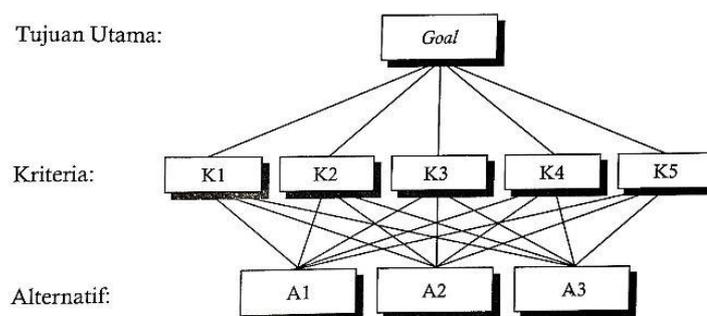
1. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty untuk mendukung pengambilan keputusan. AHP digunakan untuk memecahkan situasi yang kompleks dan tidak terstruktur menjadi beberapa komponen dalam struktur hierarkis. Dalam metode

ini, diberikan penilaian subjektif terhadap pentingnya setiap variabel secara relatif, dan variabel dengan prioritas tertinggi ditentukan untuk mempengaruhi hasil situasi tersebut (Saaty & Vargas, 2012). Tujuannya adalah untuk membantu pengambil keputusan dalam mengatasi kompleksitas dan ketidakstrukturan suatu situasi dengan memberikan kerangka prioritas yang jelas. Dasar penggunaan AHP adalah dekomposisi (*decomposition*), perbandingan penilaian (*comparative judgement*), dan sintesa prioritas (*priority synthesis*).

a. Dekomposisi (*Decomposition*)

Setelah permasalahan telah didefinisikan, langkah selanjutnya adalah melakukan dekomposisi, yaitu memecah permasalahan utuh menjadi unsur-unsurnya. Agar mendapatkan hasil yang akurat, unsur-unsur tersebut juga dapat dibagi-bagi hingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pemecahan lebih lanjut. Hal ini menghasilkan beberapa tingkatan permasalahan yang disebut hierarki. Terdapat dua jenis hierarki, yaitu hierarki lengkap dan hierarki tidak lengkap. Dalam hierarki lengkap, setiap elemen pada suatu tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya. Namun, jika tidak semua elemen ada, maka hierarki tersebut disebut sebagai hierarki tidak lengkap.



Gambar 1. 7 Bagan Struktur AHP

Sumber: (Marsono, 2020)

Proses dekomposisi AHP menghasilkan suatu bagan hierarki yang terbagi menjadi tiga yaitu penentuan tujuan, penentuan kriteria, dan penentuan alternatif. Penentuan tujuan berarti menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui *analytical hierarchy process*. Bagian kedua yaitu penentuan kriteria yang berarti menentukan kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan prioritas antar alternatif yang ada. Terakhir yaitu bagian alternatif yang merupakan beberapa alternatif yang akan ditentukan tingkat kepentingannya melalui AHP.

b. Perbandingan Penilaian (*Comparative Judgement*)

Pada tahap ini dilakukan penilaian terkait dengan pentingnya dua elemen relatif terhadap tingkat di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari metode AHP karena akan mempengaruhi prioritas elemen-elemen tersebut. Hasil penilaian ini dapat disajikan dalam bentuk matriks *pairwise comparison* yang akan memberikan gambaran yang lebih baik. Untuk membandingkan dua elemen dengan skala yang bermanfaat responden perlu memiliki pemahaman menyeluruh tentang elemen-elemen yang dibandingkan dan relevansinya terhadap kriteria atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen berlaku aksioma *reciprocal* artinya jika elemen *i* dinilai 3 kali lebih penting dibanding *j*, maka elemen *j* harus sama dengan $1/3$ kali pentingnya dibanding elemen *i*.

c. Sintesa Prioritas (*Priority Synthesis*).

Setiap matriks *pairwise comparison* kemudian dicari eigen vector untuk mendapatkan *local priority*, karena matriks *pairwise comparison* terdapat pada

setiap tingkat, maka untuk mendapatkan *global priority* harus dilakukan sintesa di antara *local priority*. Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut bentuk hierarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesa dinamakan *priority setting*.

Proses *Analytical Hierarchy Process* pada penelitian ini akan menggunakan software Expert Choice 11. Expert Choice adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kriteria-kriteria yang beragam. Dengan menggunakan Expert Choice kelompok pembuat keputusan dapat melakukan proses pengambilan keputusan secara efisien, analitis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perangkat lunak ini menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari input data kriteria dan alternatif pilihan, hingga penentuan tujuan. Dengan dukungan grafik dua dimensi hasil yang dihasilkan oleh Expert Choice dapat lebih mudah dipahami. Expert Choice beroperasi didasarkan pada metode/proses hirarki analitik (*Analytical Hierarchy Process/AHP*).